

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi sangat penting karena ketika berbicara tentang pembangunan ekonomi maka berbicara tentang proses pembangunan yang melibatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mendorong proses pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana keadaan ekonomi suatu negara terus membaik dalam kurun waktu tertentu. Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan pendapatan nasional.

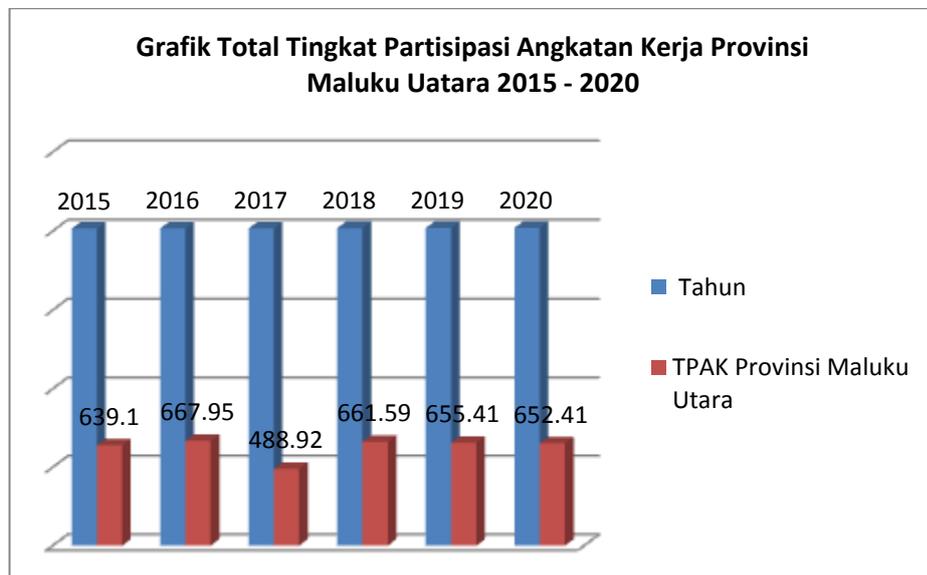
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat mendorong pembangunan suatu wilayah. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi jangka panjang suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi adalah ukuran utama keberhasilan di bawah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi jangka panjang diperlukan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga merupakan sumber daya yang potensial sebagai penggerak ide dan implementasi dari pada pembangunan daerah, sehingga dapat menggerakkan daerah dengan jumlah lapangan pekerjaan produktif yang semakin meningkat, yang akan

menambah daerah sesuai hasil Output Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS). jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar akan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan hasil output suatu daerah.

Tenaga kerja merupakan bagian dari pergerakan roda pembangunan ekonomi. Jumlah pekerja akan berubah dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu. Bagian dari angkatan kerja yang berperan aktif dalam perekonomian disebut angkatan kerja aktif, atau Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ( Selama 2015-2020).

**Grafik 1.1 Kontribusi Tingkat Partisipasi angkatan tenaga kerja maluku utara 2015-2020**

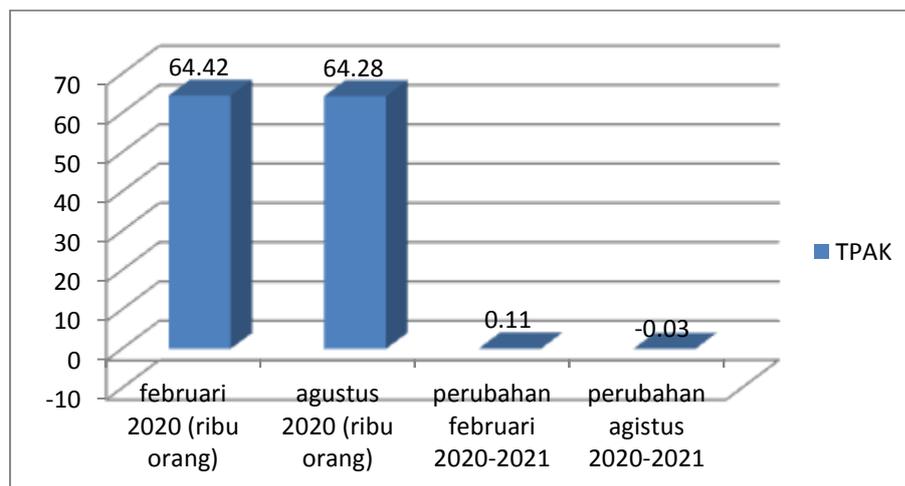


Sumber data: Badan pusat statistik Maluku utara

Jumlah Angkatan Kerja dalam hitungan total keseluruhan 10 kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2015 tercatat sebesar 639.1 ribu jiwa bertambah di tahun 2016 sebesar 667.95 ribu jiwa

dari tahun 2015-2016 mengalami kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja secara keseluruhan di 10 kabupaten/kota sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 488.92 hal ini dikarenakan adanya faktor lain yang mempengaruhi sehingga mengalami penurunan (*caterus paribbu*). Tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 661.59 ribu jiwa. hal ini tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan tahun 2019 sebesar 655.41 ribu jiwa dan 652.41 ribu jiwa.

**Grafik 1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara Februari 2020-2021**



Sumber data: badan pusat statistik Provinsi Maluku utara

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Februari 2021 mengalami penurunan dibandingkan Februari 2020, namun sedikit meningkat dibandingkan Agustus 2020. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Februari 2021 tercatat sebesar 64,31%, turun 0,11 poin persentase dibandingkan Februari 2020 64,42 persen dan meningkat 0,03 poin persentase dibandingkan Agustus 2020 64,28 persen kemudian, Tingkat Pengangguran Umum (TPT) Maluku Utara Februari 2021 tercatat sebesar

5,06 persen, meningkat 0,97 poin persentase dibandingkan TPT Februari 2020 4,09 persen, namun meningkat dari 5.000 pada Agustus 2020,15 penurunan sebesar 0,09 poin persentase. Perlu dicatat bahwa pada Februari 2020, kondisi tenaga kerja belum terkena dampak pandemi Covid-19. Namun, sejak Agustus 2020 hingga Februari 2021, pandemi Covid-19 mulai berdampak pada tenaga kerja.

Belanja pemerintah juga memegang peran penting dalam pembangunan daerah, yang secara tidak langsung atau langsung tercermin dalam belanja pemerintah daerah dan dialokasikan dalam APBD. Belanja pemerintah yang terlalu kecil akan merugikan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya, Belanja pemerintah yang produktif dan proporsional, semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin boros Belanja pemerintah yang menghambatnya. Lihatlah Belanja pemerintah dari Belanja tidak langsung dan langsung.

Besarnya Belanja pemerintah baik tidak langsung maupun langsung digunakan karena adanya suatu proyek atau kegiatan, antara lain biaya pegawai (gaji dan tunjangan, uang dan perwakilan), biaya bunga, biaya hibah, biaya, biaya hibah. biaya bantuan, biaya pendapatan, biaya dukungan keuangan dan biaya tak terduga. Belanja tidak langsung hanya dapat dianggarkan oleh satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD).

Pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung berperan penting dalam mendukung mekanisme reguler pemerintahan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktif gilirannya mencapai maksud tujuan serta tahapan pembangunan dalam belanja langsung adalah

belanja daerah yang langsung dianggarkan yang terkait langsung pengeluarannya merupakan pengeluaran pegawai (gaji dan iuran) pengeluaran barang dan jasa serta belanja modal yang digunakan langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah..

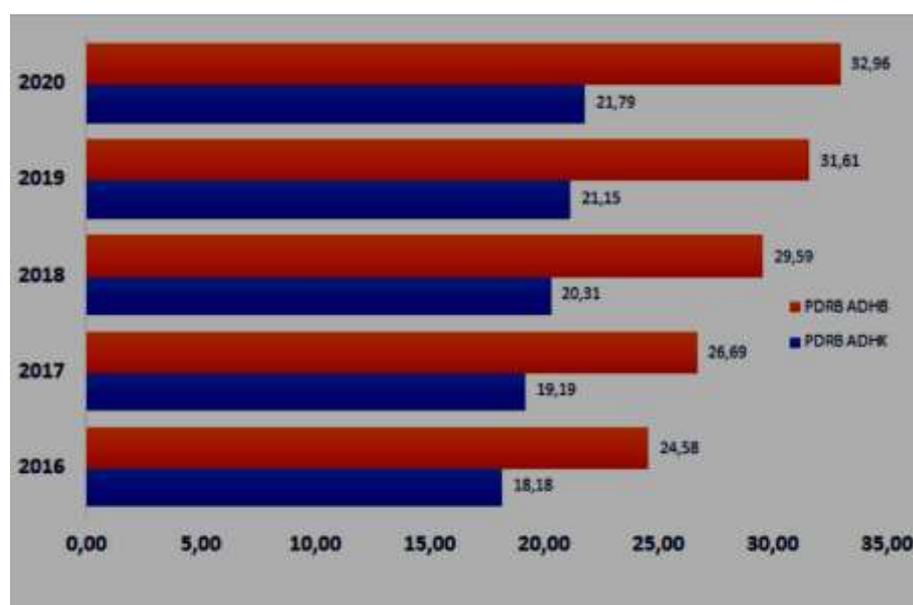
Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 Tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu Belanja tidak langsung dan langsung. Belanja pemerintah daerah melalui belanja langsung dan tidak langsung merupakan instrumen intervensi pemerintah dalam perekonomian yang dianggap paling efektif. komposisi konsumsi Pemerintah merupakan penyumbungan fasilitas PDRB yang terbesar ketiga di provinsi maluku utara adanya partisipasi sebesar 31,22 persen. Dengan laju Pertumbuhan Konsumsi masyarakat lambat menjadi 4,04% dari pertumbuhan 6,8% pada tahun 2017. dengan asumsi tidak adanya perubahan pada komponen Pengeluaran lainnya (ceteris paribus), dalam setiap kenaikan satu persen belanja publik akan mendorong pertumbuhan ekonomi 1,96 persen..

PDRB adalah besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan produktif dalam perekonomian daerah (Adisasmita, 2011), jika PDRB tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya berarti daerah tersebut telah merubah kondisi perekonomian. Pembangunan ekonomi yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDRB) dan dapat menjadi jembatan dalam realisasi pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu wilayah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagai subsistem negara untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai daerah otonom Kabupaten/Kota berperan sebagai “mesin” sedangkan pemerintah Provinsi sebagai koordinator memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat. Tingkat kemajuan ekonomi dapat dilihat dari hasil kegiatan ekonomi dengan perbandingan sektor-sektor yang memberikan kontribusi penting terhadap produk domestik bruto. Beberapa sektor terlibat dalam pendapatan yang cukup atau nilai tambah terhadap PDRB. meliputi sektor investasi, tenaga kerja dan belanja publik.

**Grafik 1.3. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Maluku Utara, 2016–2020 (Juta Rupiah)**



Sumber data : Badan Pusat Statistik

PDRB per-kapita Maluku Utara Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu terjadi peningkatan. tahun 2016, PDB per-kapita tercatat sebesar Rp 24,58 juta. Secara jumlah terus meningkat

menjadi 32,96 juta rupiah pada tahun 2020. Peningkatannya PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010. Selama periode 2016-2020, PDRB per kapita tahun 2010 konstan harga selalu naik. Nilai PDRB per kapita sebesar Rp 18,18 juta. pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 21,79 juta. pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 4,45%.

Maluku Utara sendiri pada tahun 2020 didasarkan pada besaran produk domestik regional bruto (PDRB) di atas harga dasar saat ini yang mencapai Rp 42.142,2 miliar dan harga dasar konstan yang mencapai Rp 27.868,5 miliar. Perekonomian Maluku Utara tumbuh 4,92% pada tahun 2020, lebih rendah dari capaian 6,10% pada tahun 2019. Dari sisi manufaktur, sebagian besar sektor usaha tumbuh, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor manufaktur, yang tumbuh sebesar 59,07%. Dari sisi beban, pertumbuhan terbesar diperoleh Komponen Ekspor Luar Negeri (LN Ekspor) yang tumbuh sebesar 61,19%.

(Wahana 2020) Penelitian tentang pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, penyerapan tenaga kerja dan belanja publik positif, dan belanja publik positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

(Ninla 2014) dengan judul penelitian Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB

Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2010-2014 hasil penelitian penelitian menyimpulkan bahwa secara serentak investasi, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan hasil F Statistik 3,55 lebih besar dari tabel F yaitu 2,38. Berbeda dengan hasil uji parsial. Hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa investasi dan belanja publik berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Wahana dan Ninla Elwati Fadila yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa investasi, belanja pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan hasil penelitian (Lestari 2019), judul penelitian pengaruh investasi, tenaga kerja, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi Tahun 2011-2017. Dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi mempunyai Pengaruh negatif dan tidak Signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada periode 2011-2017. Dan tenaga kerja, Pengeluaran Pemerintah Pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode tahun 2011-2017. investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mengangkat penelitian yang berjudul Pengaruh Tingkat Partisipasi angkatan Kerja, Belanja Pemerintah Tidak Langsung dan Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara 2016-2020.

## **1.2. Rumusan masalah**

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah dengan keanekaragaman pulau dan laut, jumlah energi alam yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai penghasil sumber daya alam sangat penting untuk pertumbuhan. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di segala bidang sehingga masyarakat dapat bertahan. Investasi, pengeluaran pemerintah, dan tingkat penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu peluang hidup yang dapat di manfaatkan oleh penduduk Provinsi Maluku Utara. Meningkatkan investasi, pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja, dalam hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan infrastruktur yang memadai, dan memberikan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Dampak Tingkat Partisipasi Angka Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Maluku Utara?
2. Bagaimana Dampak Belanja Pemerintah Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Maluku Utara?
3. Bagaimana Dampak Belanja Pemerintah Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Maluku Utara?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dampak pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Maluku Utara!

2. Menganalisis dampak Pengaruh Belanja Pemerintah Tidak langsung Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara!
3. Menganalisis Belanja Pemerintah langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara!

#### **1.4. Manfaat penelitian.**

1. Sebagai bentuk bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Tingkat Partisipasi angkatan Kerja, Belanja Pemerintah tidak Langsung dan Belanja Pemerintah langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah bahan evaluasi terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam proses peningkatan pertumbuhan daerah dari tahun ke tahun.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi rujukan terhadap pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara lebih fokus dalam meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Belanja Pemerintah Tidak Langsung dan Langsung di Provinsi Maluku Utara.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIK**

#### **2.1 Teori Produk Domestik Regional Bruto**

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa yang diukur dengan produk domestik bruto (PDRB). Semakin meningkat produk domestik regional bruto dalam suatu daerah maka semakin meningkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena daerah tersebut..

PDRB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang disediakan oleh suatu wilayah atau wilayah pada tahun tertentu. Dengan meningkatnya PDRB akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perkembangan PDRB dari tahun ke tahun mencerminkan perkembangan PDRB akibat perubahan jumlah produksi barang dan jasa yang terjadi dan perubahan tingkat harga, sehingga mengukur perubahan ukuran output dan output. Perkembangan. Yang penting, masalah pengaruh harga harus dihilangkan dengan menghitung PDRB berdasarkan harga tetap (Alista, 2014).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Salah satu indikator yang penting dalam menentukan keadaan perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto, berdasarkan harga berlaku dan atas dasar harga berlaku. PDRB merupakan nilai tambah dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah atau wilayah dalam periode tertentu. Nilai PDRB digunakan sebagai ukuran yang baik untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah. (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pertumbuhan ekonomi merupakan bentuk stabil dari perekonomian suatu negara yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan karena bertambahnya pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendukung pembangunan nasional di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan pembangunan negara.

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi suatu wilayah, tetapi besarnya pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kuznets dalam (Todaro 2004), berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah ukuran jangka panjang dari kemampuan suatu negara untuk membawa berbagai barang ekonomi untuk penduduknya. Kapasitas ini akan meningkat dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk mengubah tujuan dan perspektif.

Menurut (Todaro 2004), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: akumulasi modal mencakup semua jenis investasi baru yang dilakukan di tanah, peralatan fisik dan modal, atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk seiring bertambahnya modal, dan kemajuan teknologi. Perbedaan kekayaan, modal fisik dan modal manusia setiap daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menurut BPS 2010 dalam (Andy Pratama), (Ady Soejoto 2016) "Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang diciptakan oleh jenis badan usaha tertentu yang membawa operasi bisnis ke titik di mana tidak

memperhitungkan beratnya masalah produksi. PDRB dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis ekonomi, yaitu: Pertanian, Industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perbelanjaan, hotel dan restoran; transportasi dan komunikasi; leasing dan jasa perusahaan; layanan lainnya”.

Beberapa ekonom membedakan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Para ekonom yang membedakan kedua metode tersebut mendefinisikan istilah pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu peningkatan Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto dalam satu tahun dibagi dengan laju pertumbuhan penduduk.
2. Perkembangan produk dalam negeri yang terjadi di suatu negara disertai dengan perubahan dan perubahan struktur ekonominya (*a structural change*). Saat ini, pertumbuhan ekonomi disebut sebagai Produk Domestik Bruto/Produk Nasional Bruto, yang lebih kurang dari pertumbuhan penduduk, bahkan jika tidak ada perluasan struktur ekonomi (Arsyad, 1999).

Menurut (Simon Kuznets) dan (M.L Jhingan 2002) pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya kemampuan suatu negara atau daerah menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduk akan terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi suatu wilayah, tetapi besarnya pertumbuhan ekonomi tidak

mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya. (Kuznets) menyatakan dalam (Todaro 2004) bahwa pertumbuhan ekonomi adalah ukuran jangka panjang dari kemampuan suatu negara untuk memberikan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya; Kapasitas ini akan meningkat dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk mengubah tujuan dan perspektif.

Menurut (Todaro 2004), terdapat tiga faktor utama untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu: akumulasi modal yang meliputi semua bentuk investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk yang akan memperbanyak akumulasi kapital, serta kemajuan teknologi. Perbedaan sumber daya baik modal fisik maupun modal manusia yang dimiliki masing-masing wilayah menyebabkan berbeda pula pertumbuhan ekonominya.

### **2.1.1. Teori Belanja Pemerintah**

Belanja pemerintah merupakan bagian dari kebijakan moneter, peran pemerintah adalah mengelola keadaan ekonomi dengan menentukan jumlah permintaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun (Reksoprayitno, 1997) mengukur pengeluaran pemerintah daerah dari total pengeluaran operasi dan pembangunan yang dialokasikan dalam APBD, dan tingkat ekonomi suatu wilayah (Wibisino, 2003).

Belanja Pemerintah Menurut (Mangkoeubroto), belanja pemerintah tahun 2008 menggambarkan kebijakan dari pemerintah. Jika Pemerintah sudah menerapkan kebijakannya pembelian barang/jasa, maka pengeluaran pemerintah akan mencerminkan biaya yang harus

dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai indikator seberapa besar pekerjaan pemerintah dibayar oleh Belanja pemerintah. Semakin banyak yang dilakukan pemerintah, semakin banyak yang dibelanjakan. Rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (GNP) adalah ukuran kinerja pemerintah per kapita.

Jumlah pengeluaran pemerintah (C) dan pengeluaran pemerintah (G), bentuk matematikanya disebut  $Y = C + I + G$  disebut produk langsung, identitas, atau produk. Pengeluaran pemerintah sama dengan sosial, pengeluaran pemerintah meningkatkan permintaan dan permintaan meningkat. Produksi atau agregasi ditingkatkan untuk menciptakan kesempatan kerja dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah (Boediono, 1998). Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari proposal agregat. Tujuan penghitungan pendapatan dan pengeluaran nasional telah disebutkan.

$$Y = C + I + G + X - M.$$

Model ini dapat dikenal sebagai identitas keuangan Nasional, yang menggambarkan agregasi. Bahkan Variabel sebelah kanan disebut permintaan agregat. Variabel G mewakili pengeluaran pemerintah, Dalam manufaktur,  $X - M$  adalah pengeluaran bersih eksternal. Dengan bandingkan Nilai G dan Y melihatnya waktu ke waktu, dapat dilihat kontribusi yang signifikan dari pengeluaran pemerintah untuk membangun permintaan agregat dan pendapatan nasional. Hal ini memungkinkan untuk menganalisis pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian

nasional. Pemerintah tentu saja tidak hanya melakukan pengeluaran, tetapi juga memperoleh penerimaan.

Penerimaan dan pengeluaran pemerintah termasuk dalam skema gabungan Penerimaan dan belanja pemerintah. Kebijakan dapat menghubungkan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah (government revenue and expenditure) disebut kebijakan moneter. Pengeluaran pemerintah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah membuat anggaran yang setiap tahun didistribusikan ke India dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).

### **2.1.2. Teori Peacock dan Wiseman**

Teori yang berdasarkan analisis pengeluaran pemerintah. Bahkan jika tidak ada yang perlu membayar pajak yang lebih tinggi untuk mengimbangi peningkatan Belanja pemerintah, pemerintah selalu berusaha meningkatkan pengeluaran dengan mengandalkan tarif pajak yang lebih tinggi. Menaikkan tarif pajak akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dalam keadaan normal, inflasi GNP akan meningkatkan pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran pemerintah akan meningkat. Peacock dan Wiseman didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat memiliki tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif yang dibayarkan kepada pemerintah dan tarif yang digunakan untuk menentukan pengeluaran pemerintah.

masyarakat sadar bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk mendanai kegiatannya. Tingkat toleransi ini mencegah pemerintah meningkatkan penerimaan pajak secara sewenang-wenang. Dalam teori Peacock dan Wiseman, terdapat efek  $i$ , yaitu keresahan sosial, yang

menggeser aktivitas swasta ke aktivitas pemerintah. Selain meredakan krisis pajak, pemerintah harus meminjam uang dari luar negeri. Setelah gejala mereda, Anda harus melunasi utang dan membayar bunga.

### **2.1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Menurut Sony Sumarsono (2003:86) salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya TPAK adalah kegiatan ekonomi. Di mana belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, dengan tujuan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan banyak orang, dan dipihak lain program pembangunan menumbuhkan harapan-harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut yang dinyatakan dalam peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi, semakin bertambah kegiatan kegiatan ekonomi semakin besar pula TPAK suatu daerah/wilayah tersebut.

Faktor lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah jumlah tenaga kerja. Angkatan kerja adalah penduduk berusia (15-64 tahun) atau jumlah penduduk suatu negara yang menghasilkan barang dan jasa dan tidak ada pada saat ada permintaan tenaga kerja pada saat angkatan kerja berpartisipasi secara aktif. Menurut (Todaro) dalam (Heindy Menjeng), pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (AK) secara tradisional dipandang sebagai salah satu faktor positif pendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah pekerja yang lebih besar akan meningkatkan tingkat produksi, sementara pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan berarti ukuran pasar domestik yang lebih besar. Namun,

masih dipertanyakan apakah laju pertumbuhan yang tinggi itu justru akan berdampak positif atau negatif terhadap pembangunan ekonomi.

Menurut (Muamjntak) dalam (Hardian Rusli), tenaga kerja terdiri dari penduduk setempat yang memiliki atau menerima pekerjaan dan terlibat dalam kegiatan. Mereka mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi mereka juga memiliki pekerjaan fisik dan sesekali. Pengertian yang diungkapkan oleh Sumanjuntak memiliki pengertian yang lebih luas terkait dengan pekerjaan.

#### **2.1.4. Teori Tenaga Kerja**

Teori (lawis 1959) yang menyatakan bahwa kelebihan pekerjaan merupakan kesempatan kerja dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerjaan satu sektor akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi pekerjaan kita dan penciptaan lapangan kerja di sektor lain. Ada dua struktur dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsistem terbelakang. Menurut (Lewis), sektor subsistem tertinggal tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang kaki lima dan pengecer surat kabar. Sektor subsistem terbelakang memiliki kelebihan pasokan pekerja dan tingkat upah yang relatif rendah dibandingkan dengan sektor kapitalis modern. Mengurangi biaya upah pekerja pedesaan akan menjadi insentif bagi pengusaha perkotaan untuk menggunakan pekerja ini dalam pengembangan industri perkotaan modern. Selama proses industrialisasi, kelebihan pasokan di sektor subsisten akan diserap.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang di lakuka sebelum Penulis dan di gunakan sebagai referensi penelitian.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit	Metode Penelitian/model	Hasil Penelitian
1. faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja di pulau Kalimantan (Saputra, Zulfanetti, dan Edi 2019)	Data panel (Cross section dan time Series)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pembangunan daerah yang komprehensif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi tenaga kerja, upah minimum, dan bahwa penanaman modal asing daerah memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan tingkat penanaman modal dalam negeri (PMDN) lainnya, yang tidak signifikan. memengaruhi. penting. Pada tingkat partisipasi dalam angkatan kerja.
2. Analisis tingkat pendidikan dan tpak terhadap pdrb perkapita di Indonesia. (Affandi, Fahlevi, dan Rabiana Risma, 2015)	Regresi, data panel medel analisis data panel yang menggabungkan antara data <i>cross section</i> dengan <i>time series</i> .	Hasil penelitian menunjukan bahwa PDRB dipengaruhi tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB perkapita di Indonesia. usia 7 sampai 12 tahun dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB perkapita di Indonesia
3. Pengaruh pengeluaranpemerintah dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di provinsi kalimantan timur (Jirang 2014)	<i>structural equation model</i> (sem)	hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan invetasi secara langsung belum mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kalimantan timur, namun secara langsung peningkatan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta mampu mengurangi tingkat pengangguran di kalimantan timur.
4. Analisis pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung Terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten/kota	regresi data panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, belanja tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelima, belanja tidak langsung berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan baik

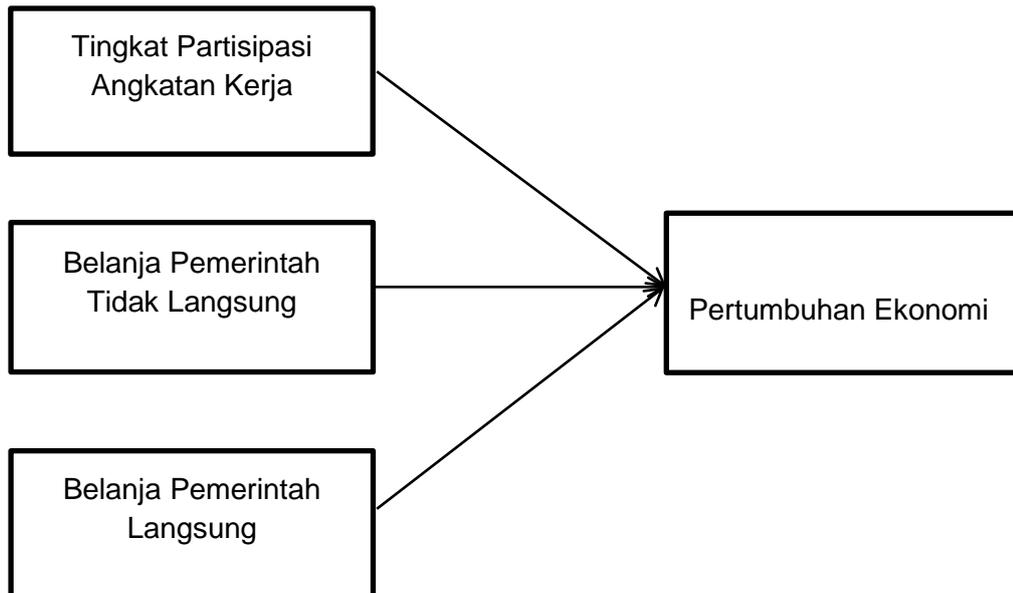
provinsi sulawesi Utara tahun 2010–2015 (Kaat, Kindangen 2016)		secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Rasio Beban Ketergantungan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Rozmar, Junaidi, dan Bhakti 2017)	deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif menggunakan alat analisis yaitu regresi data panel	hasil uji secara silmultan menunjukkan bahwa seluruh variabel independent memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan di uji secara parsial menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan TPAK tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.
6. pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Pada sektor Industri pengolahan(Saefurrahman, Suryanto, dan Wulandari 2017)	observasi, dokumentasi, dan studi pustaka	Hasil uji T (uji parsial) menunjukkan bahwa variabel ketenagakerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi pertumbuhan ekonomi pada industri manufaktur Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pengaruh belanja langsung, belanja tidak langsung, investasi, dan tenaga kerja terhadap Pertumbuhan ekonomi di wilayah ekskaresidenan Semarang pada era otonomidaerah Dan desentralisasi fiskal (Rudibdo dan Sasana 2017)	Data yang digunakan adalah data sekunder Time series selama periode 8 tahun (2008-2015). Data dianalisis dengan menggunakan	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa pengeluaran langsung dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan Terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja tidak langsung dan investasi berpengaruh Negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
8. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan upah minimum Regional (umr) terhadap tingkat partisipasi angkatan Kerja di kota makassar	Data yang digunakan adalah periode 2005-2014.	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota makassar, sedangkan upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tpak.

(Ikhwan dan Siradjuddin 2017)		
9. Pengaruh investasi dan belanja langsung serta belanja tidak langsung terhadap Pertumbuhan ekonomi (Mas'ud, Wijaya, dan Gani 2021)	Analisis Jalur melalui Program SPSS,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi, berpengaruh positif dan tidak signifikan, belanja pemerintah langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
10. Analisis pengaruh peningkatan investasi, pendapatan asli daerah dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi jambi (AZ dan Pebrina 2019)	Kauntitatif	Secara khusus, investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi, dan angkatan kerja tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Sumber : Jurnal terdahulu

### 2.3. Kerangka Pikir

Dalam konteks berpikir, hubungan antar variabel yang terkait dengan penelitian ini dijelaskan secara logis. Model kerangka konseptual yang digunakan peneliti agar lebih mudah dipahami, konsep yang digunakan adalah sebagai berikut: Gambar Kerangka Pikir 1.1



Sumber : kerangka pikir Nurul Yunus

Gambar di atas menunjukkan kerangka penelitian yang mengarah pada pengaruh investasi, belanja publik dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 8 kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan menggunakan data cross section dan time series, dalam penelitian ini diambil sampel dari 5 tahun terakhir

### 2.4. Hipotesis

Hipotesa merupakan asumsi atau kesimpulan sementara dan ditarik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, diuji secara empiris. Maka penelitian ini ajuka hipotesis sebagai erikur;

**1. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara.**

$H_0$  = dugaan sementara bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara.

$H_1$  = dugaan sementara bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara.

**2. Pengaruh Belanja Pemerintah Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di provinsi Maluku Utara.**

$H_0$  = dugaan sementara bahwa Belanja Pemerintah Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara.

$H_1$  = diduga bahwa Belanja Pemerintah Tidak Langsung berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

**3. Pengaruh Belanja Pemerintah Secara Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

$H_0$  = dugaan sementara bahwa Belanja pemerintah Secara Langsung berpengaruh positif dan signifikan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku Utara.

$H_1$  = dugaan sementara bahwa Belanja Pemerintah Secara Langsung tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Maluku Utara

